# RENCANA AKSI ATAS PK (PERJANJIAN KINERJA)

TAHUN 2020

## DINAS SOSIAL
## KABUPATEN BULELENG


http://dinsos.bulelengkab.go.id

dinsos@bulelengkab.go.id

(0362) 21248

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi**.** Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 30 Desember 2019.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BULELENG

**I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

# DAFTAR ISI

*Halaman*

**Kata Pengantar ..... i**

**Daftar Isi ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ..... 2

1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja..... 3

**BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA ..... 5**

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis ..... 5

2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama ..... 10

**BAB III PENUTUP ..... 12**

**LAMPIARAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi padahasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagimasyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untukmemerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalahpemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namunmembutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsisecara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlumengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai denganbatasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintahjuga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita

Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntunan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
    1. Sekretaris terdiri dari :
        a. Sub Bagian Perencanaan
        b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
    2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
        a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
        b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
        c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
    3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
        a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
        b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
   a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
   b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
   c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
   a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
   b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

## 1.3 Tujuan Indikator Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi

b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public

c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah :

a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah

d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

# BAB II

# RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VISI :** Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana* | | | |
| **MISI I :** Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Pertumbuhan ekonomi yang inklusif | Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin. | • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.<br>• Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS. | • Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.<br>• Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS. |

Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG URUSAN | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin | Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. | Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial | Persentase PMKS yang tertangani | 2,75% | 5,8% | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Sosial | Dinsos |
| | | | | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial . | Sosial | Dinsos |
| | Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS. | Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 4,28% | 20,5% | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya | Sosial | Dinsos |
| | | | | | | Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial. | Sosial | Dinsos |

## A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

### 1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : **Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS,** meliputi :

a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
d. Menyelenggarakan perlindungan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial.

### 2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS*** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. ***Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin*** melalui Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. ***Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme*** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat .

Tabel 2.1.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

| **Sasaran** | **Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran** | |
|---|---|---|
| | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). | Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial. | Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial . |
| Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS. | Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. | Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial . |
| Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial. | Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. |

## 2.1 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja aka diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak

dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).

# BAB IV

# P E N U T U P

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai. Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik *(Good Governance)* atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 30 Desember 2019.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

**I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**
**TAHUN 2020**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Eselon II** | | | | | | | | | | |
| | **Kepala Dinas** | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).** | **Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** | **0,00%** | **0,15%** | **0,30%** | **0,63%** | | | | | Dinas Sosial Kabupaten Buleleng |
| | | | | | | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 52.500.000 | |
| | | | | | | | | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE | 279.600.000 | |
| | | | | | | | | Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 115.400.000 | |
| | | | | | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | 18.300.000 | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 24.200.000 | |
| | | | | | | | | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 340.000.000 | |
| | | | | | | | | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak nakal. | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 89.000.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | Program pembinaan anak terlantar | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan peraktek belajar kerja, jumlah anak terlantar penerima bantuan sembako | 200.000.000 | |
| | | | | | | | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 55.650.000 | |
| | | | | | | | | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 139.350.000 | |
| | | | | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 264.000.000 | |
| | | | | | | | | Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 165.863.000 | |
| | | | | | | | | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial dan jumlah kepesertaan JKN-KIS yang diusulkan | 310.000.000 | |
| | | | | | | | Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma | Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 80.000.000 | |
| | | | | | | | | Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 425.000.000 | |
| **II.** | **Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif** | **Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.** | **0,00%** | **20,00%** | **40,00%** | **80%** | | | | | |
| | | | | | | | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 95.000.000 | |
| | | | | | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 62.675.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah WKSBM (Karang Taruna) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 39.600.000 | |
| | | | | | | | | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 100.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |

Singaraja, 30 Desember 2019.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

**I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 198602 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**
**TAHUN 2020**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | ESELON III | | | | | | | | | | |
| **A.** | Sekretaris | | | | | | | | | | |
| I | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor | 25% | 50% | 75% | 100% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | 51.162.000 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik yang terbayarkan | 182.000.000 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis kendaraan dinas | 231.240.000 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | 9.500.000 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis laporan keuangan | 163.839.600 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 139.733.400 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 38.993.700 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12.730.400 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 12.097.000 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia | 8.900.000 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 13.168.000 | |
| | | | | | | | | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 85.331.172 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 152.587.000 | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | 45.000.000 | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 16.000.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 114.325.000 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | 10.000.000 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 60.500.000 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 30.000.000 | |
| | | | | | | | | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | 64.630.000 | |
| II | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu | 2 Jenis Dokumen | 3 Jenis Dokumen | 5 Jenis Dokumen | 7 Jenis Dokumen | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | 83.500.000 | |
| | | Persentase akuntabilitas kinerja SKPD | 25% | 50% | 75% | 100% | Program Perencanaan Anggaran SKPD | Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | 166.415.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| B. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif | 166 Orang/ Lembaga | 332 Orang/ Lembaga | 498 Orang/ Lembaga | 666 Orang/ Lembaga | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 52.500.000 | |
| | | | | | | | | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE | 279.600.000 | |
| | | | | | | | | Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 115.400.000 | |
| | | | | | | | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 95.000.000 | |
| | | | | | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 62.675.000 | |
| | | | | | | | | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah WKSBM (Karang Taruna) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 39.600.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 100.000.000 | |
| | | | | | | | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan | 428.280.300 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 154.579.700 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara | 756.999.528 | |
| | | | | | | | | | | | |
| C | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana | Jumlah Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana | 168 KK | 336 KK | 504 KK | 675 KK | Program Informasi Pembangunan Daerah | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | 51.280.000 | |
| | | | | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 264.000.000 | |
| | | | | | | | | Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 165.863.000 | |
| | | | | | | | | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial dan jumlah kepesertaan JKN-KIS yang diusulkan | 310.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| D | Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik | Jumlah Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik | 152 Orang | 500 Orang | 1.466 Orang | 2.136 Orang | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | 18.300.000 | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 24.200.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 340.000.000 | |
| | | | | | | | | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak nakal. | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 89.000.000 | |
| | | | | | | | Program pembinaan anak terlantar | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan peraktek belajar kerja, jumlah anak terlantar penerima bantuan sembako | 200.000.000 | |
| | | | | | | | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 55.650.000 | |
| | | | | | | | | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 139.350.000 | |
| | | | | | | | Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma | Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 80.000.000 | |
| | | | | | | | | Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 425.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Singaraja, 30 Desember 2019.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**
**TAHUN 2020**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **ESELON IV** | | | | | | | | | | |
| **A.** | **Sekretariat** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Jumlah surat terkirim | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | 51.162.000 | |
| | | Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik yang terbayarkan | 33 Rekening / 3 Bulan | 66 Rekening / 6 Bulan | 99 Rekening / 9 Bulan | 132 Rekening / 12 Bulan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik yang terbayarkan | 182.000.000 | |
| | | Jumlah jenis kendaraan dinas | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis kendaraan dinas | 231.240.000 | |
| | | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | 9.500.000 | |
| | | Jumlah jenis laporan keuangan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis laporan keuangan | 163.839.600 | |
| | | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 139.733.400 | |
| | | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 38.993.700 | |
| | | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12.730.400 | |
| | | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 12.097.000 | |
| | | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia | 8.900.000 | |
| | | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 13.168.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 85.331.172 | |
| | | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 152.587.000 | |
| | | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | 0 LS | 0 LS | 1 LS | 1 LS | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | 45.000.000 | |
| | | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 3 Unit | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 16.000.000 | |
| | | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 114.325.000 | |
| | | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | 10.000.000 | |
| | | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 60.500.000 | |
| | | Jumlah peralatan gedung/kantor yang memadai | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 30.000.000 | |
| | | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | 64.630.000 | |
| **2.** | **Kepala Sub Bagian Perencanan** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | 2 Jenis Laporan | 3 Jenis Laporan | 5 Jenis Laporan | 7 Jenis Laporan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | 83.500.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | 2 Jenis Dokumen | 4 Jenis Dokumen | 6 Jenis Dokumen | 8 Jenis Dokumen | Program Perencanaan Anggaran SKPD | Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | 166.415.000 | |
| **B.** | **Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 2 Panti Asuhan | 5 Panti Asuhan | 5 Panti Asuhan | 7 Panti Asuhan | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 95.000.000 | |
| | | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 0 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 62.675.000 | |
| | | Jumlah WKSBM (Karang Taruna) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 0 Karang Taruna | 0 Karang Taruna | 0 Karang Taruna | 2 Karang Taruna | | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah WKSBM (Karang Taruna) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 39.600.000 | |
| | | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK | 6 Karang Taruna, 6 PSM dan 6 TKSK | 6 Karang Taruna, 6 PSM dan 6 TKSK | 9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK | | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 100.000.000 | |
| **2.** | **Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin** | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 148 Desa / Kelurahan | 148 Desa / Kelurahan | 148 Desa / Kelurahan | 148 Desa / Kelurahan | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 52.500.000 | |
| | | Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE | 0 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE | 279.600.000 | |
| | | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 0 Orang | 0 Orang | 40 Orang | 40 Orang | | Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 115.400.000 | |
| **3.** | Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan | 100 Orang / 1 Kegiatan | 100 Orang / 1 Kegiatan | 300 Orang / 3 Kegiatan | 400 Orang / 5 Kegiatan | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan | 428.280.300 | |
| | | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 1 Monumen | 2 Monumen | 4 Monumen | 5 Monumen | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 154.579.700 | |
| **C.** | **Bidang Perlindungan Jaminan Sosial** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana** | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana | Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 166 KK dan 2 Orang | 332 KK dan 4 Orang | 498 KK dan 6 Orang | 675 KK dan 6 Orang | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 264.000.000 | |
| **2.** | **Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | 1 Kali | Program Informasi Pembangunan Daerah | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | 51.280.000 | |
| | | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 0,25 Tahun | 0,50 Tahun | 0,75 Tahun | 1 Tahun | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 165.863.000 | |
| **3.** | **Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial dan jumlah kepesertaan JKN-KIS yang diusulkan | 0,25 Lembaga | 0,50 Lembaga | 0,75 Lembaga | 1 Lembaga | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial dan jumlah kepesertaan JKN-KIS yang diusulkan | 310.000.000 | |
| **D** | **Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak Dan Lanjut Usia** | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 20 Orang | 200 Orang | 485 Orang | 705 Orang | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 340.000.000 | |
| | | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 0 Anak | 0 Anak | 0 Anak | 20 Anak | | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak nakal. | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 89.000.000 | |
| | | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan peraktek belajar kerja, jumlah anak terlantar penerima bantuan sembako | 0 Anak | 45 Anak | 255 Anak | 460 Anak | Program pembinaan anak terlantar | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan peraktek belajar kerja, jumlah anak terlantar penerima bantuan sembako | 200.000.000 | |
| **2.** | **Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 0 Orang | 0 Orang | 40 Orang | 40 Orang | Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma | Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 80.000.000 | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 122 Orang | 213 Orang | 304 Orang | 394 Orang | | Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 425.000.000 | |
| **3.** | **Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa | 0 Orang | 10 Orang | 30 Orang | 30 Orang | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | 18.300.000 | |
| | | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 0 Orang | 0 Orang | 300 Orang | 300 Orang | | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 24.200.000 | |
| | | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 0 Orang | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 55.650.000 | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target/Satuan | | | | PROGRAM | KEGIATAN | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | Uraian | Indikator Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 10 Orang | 20 Orang | 40 Orang | 175 Orang | | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 139.350.000 | |
| **E.** | **UPT Monumen Dan Tugu Perjuangan** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kepala UPT Monumen Dan Tugu Perjuangan** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara | 1,25 Monumen / Tugu Perjuangan | 2,50 Monumen / Tugu Perjuangan | 3,75 Monumen / Tugu Perjuangan | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara | 756.999.528 | |
| **2** | **Kepala Tata Usaha UPT Monumen Dan Tugu Perjuangan** | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara | 1,25 Monumen / Tugu Perjuangan | 2,50 Monumen / Tugu Perjuangan | 3,75 Monumen / Tugu Perjuangan | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara | 756.999.528 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Singaraja, 30 Desember 2019.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009